



# BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2022;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ...;
25. Peraturan Daerah Kabuapten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

APBD yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 652.872.589.425,00 (enam ratus lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.984.194.000,00 (tiga puluh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.028.230.000,00 (lima milyar dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.802.753.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.741.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.412.211.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus dua belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.028.230.000,00 (lima milyar dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 295.861.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).



- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.348.129.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 189.240.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.125.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.802.753.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha;
  - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.109.378.000,00 (tiga milyar seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 368.375.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

## Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.741.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD;
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.741.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.412.211.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. Pendapatan dari Pengembalian;
  - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  - h. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.452.211.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus luh juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e



direncanakan sebesar Rp. 1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 603.236.391.000,00 (enam ratus tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 591.336.391.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.900.000.000,00 (sebelas milyar Sembilan ratus juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 591.336.391.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana insentif daerah;
  - c. Dana desa;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 516.399.001.000,00 (lima ratus enam belas milyar tiga ratus

Sembilan puluh Sembilan juta satu ribu rupiah).

- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.587.861.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ratus satu ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.349.529.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 516.399.001.000,00 (lima ratus enam belas milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.109.649.000,00 (empat belas milyar seratus Sembilan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.746.716.000,00 (empat ratus milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.448.272.000,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.094.364.000,00 (empat puluh empat milyar Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

#### Pasal 12

- (1) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.587.861.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana insentif daerah;



- (2) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.587.861.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 13

- (3) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.349.529.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana desa;
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.349.529.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.900.000.000,00 (sebelas milyar Sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.900.000.000,00 (sebelas milyar Sembilan ratus jutarupiah).

#### Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a

direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya; dan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 652.872.585.425,00 (enam ratus lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 423.213.599.452,00 (empat ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 188.114.948.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 207.818.859.724,00 (dua ratus tujuh milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).



- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.921.096.200,00 (sebelas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.138.779.528,00 (empat belas milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 188.114.948.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH; dan
  - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 149.936.220.000 (seratus empat puluh sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.691.472.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.981.090.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.920.531.000,00 (sebelas milyar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 174.755.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 207.818.859.724,00 (dua ratus tujuh milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lainnya/ masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.289.976.614,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.953.604.748,00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.690.162.562,00 (enam milyar enam ratus Sembilan puluh juta serratus enam puluh dua ribu lima ratus ena puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.887.058.700,00 (lima puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lainnya/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.197.966.100,00 (lima milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu serratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.800.091.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).



#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja subsidi kepada badan usaha milk swasta.
- (2) Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.921.096.200,00 (sebelas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.912.100.000,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus dua belas juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 583.996.200,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 23

- (3) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.918.695.528,00 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bantuan social kepada individu.
  - b. Belanja bantuan social kepada keluarga.
  - c. Belanja bantuan social kepada kelompok masyarakat.
  - d. Belanja bantuan social kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (4) Belanja bantuan social kepada individu dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 694.735.200,00 (enam ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
  - (5) Belanja bantuan social kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
  - (6) Belanja bantuan social kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
  - (7) Belanja bantuan social kepada Lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.568.960.328,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 24

- (8) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.823.808.902,00 (seratus satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus dua puluh), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
  - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
  - e. Belanja aset tetap lainnya.
- (9) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.843.615.089,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu delapan puluh Sembilan rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.962.995.149,00 (lima belas milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.342.827.529,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah).

- (12) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.647.371.135,00 (empat puluh lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu serratus tiga puluh lima rupiah).
- (13) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.585.181.071,00 (seratus dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh satu ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.330.181.071,00 (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 175.652.004.425,00 (lima belas milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.152.004.425,00 (tujuh belas milyar serratus lima puluh dua juta empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.152.004.425,00 (tujuh belas milyar serratus lima puluh dua juta empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

## Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 15.652.004.425,00 (lima belas milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 15.652.004.425,00 (lima belas milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

## Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,



Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru Selatan ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Buru Selatan dengan penempatannya dalam berita daerah.

Namrole, 29 Januari 2022

BUPATI BURU SELATAN



SAFITRY MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole

Pada Tanggal 29 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN



ISKANDAR WALLA, SE, M.Si

NIP. 19621231 199008 1 004.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jemy Thenu', written over a horizontal line.

JEMY THENU, SH

NIP. 19740621 200012 1 002





BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

I Umum

Penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan ini dimaksud untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas



Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR ....